

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan 7

# Akibat Pencairan Molor, dan Juknis “Abu-Abu” (1)

Silpa Dana BOS SMA/SMK/SLB di Jateng Capai Rp 36,971 M

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB 2017 di Jateng ternyata terdapat Silpa atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran. Nilainya Rp 36,971 miliar atau 4,9 persen dari total BOS 2017 sebesar 753,557 miliar. Kenapa bisa terdapat Silpa? Apakah pihak sekolah terlalu berhati-hati menggunakan dana BOS karena takut dimejahi-jaukan?

**DALAM** penganggaran APBD baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi, idealnya tidak ada Silpa. Artinya, seluruh anggaran yang disediakan terserap untuk kebutuhan selama setahun. Pun dalam penggunaan dana BOS. Namun nyatanya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana BOS untuk SMA/SMK/SLB di Jateng masih ada Silpa. Padahal dana BOS itu turun dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan langsung ke sekolah. ▶ Baca *Akibat...* hal 7

*Sambungan dari hal.1*

Dana BOS biasanya dikurangkan berdasarkan *by name* siswa. Selain itu, ada dana BOS untuk guru, Tata Usaha (TU), dan pembelian buku Lembar Kegiatan Siswa (LKS).

Data yang diperoleh *Jawa Pos Radar Semarang*, BOS yang terbanyak Silpanya di Kota Semarang adalah SMA Negeri 2 sebesar Rp 1,160 miliar, SMK Negeri 10 sebesar Rp 530,891 juta, dan SMK Negeri 7 sebesar Rp 169,674 juta.

Kepala SMK Negeri 10 Semarang, Bambang Sujatmiko, melalui Bendahara BOS, Hadi Riyanto, menjelaskan, alasan Silpa dana BOS 2017 di sekolahnya besar, karena cairnya agak molor, sehingga turun dana mundur. Ia menyebutkan, jatah dana BOS tersebut diterima dibagi per triwulan. Saat itu, BOS triwulan 1 baru cair pada triwulan 2, dan BOS triwulan 2 cair di akhir waktu triwulan 2.

“Padahal dana BOS triwulan 2 paling besar, sedangkan untuk jatah pembelian buku maksimal 20 persen dari pencairan triwulan 2. Belum lagi proses belanjanya menggunakan e-katalog,” beber Hadi Riyanto didampingi Bendahara BOP (Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) SMK Negeri 10 Semarang, Nyaminah.

Karena itu, ia berharap ke depan dana BOS bisa cair di awal triwulan, sehingga tidak terkendala penggunaannya. Apalagi sekolahnya tidak hanya mengelola dana BOS saja. Ia menyaranakan BOS triwulan 1 bisa

cair pada Januari dan BOS triwulan 2 pada April. Begitu juga untuk triwulan 3 dan 4, masing-masing bisa cair pada Juli dan Oktober.

Untuk diketahui, pada 2017, total dana BOS yang diterima SMKN 10 sebesar Rp 1,5 miliar. Rinciannya, triwulan 1 sebesar Rp 308 juta, triwulan 2 (Rp 617 juta), triwulan 3 (Rp 323 juta), dan triwulan 4 sebesar Rp 307 juta.

“Untuk juknis (petunjuk teknis) penggunaan BOS kadang abu-abu. Karena itu, kami harus hati-hati menggunakan uang negara, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Kami selalu belanjakan sesuai juknisnya penggunaannya, sekalipun semuanya untuk kebutuhan sekolah. Kelemahannya kadang juknisnya masih terasa abu-abu, maksudnya untuk penjabaran detailnya,” jelasnya.

Ia memberikan contoh, di sekolahnya ada 4 ruang laboratorium komputer. Saat ini kondisi komputer sudah banyak yang rusak. Sedangkan penggunaan dana BOS untuk membeli komputer tidak bisa sembarangan. Menurut juknis, penggunaan dana BOS untuk membeli komputer dalam setahun dibatasi hanya 5 unit. Pun dengan LCD proyektor juga 5 unit, dan laptop 1 unit. “Ya, akhirnya kami cuma bisa menggunakan dana pemeliharaan, memang bisa untuk belanja modal, hanya saja dibatasi jumlahnya. Kebanyakan belanja barang dan jasa yang habis pakai,” katanya.

Diakuinya, setiap kali dana

BOS cair, semuanya ada ketentuan, apalagi setelah sekolah setingkat SMA mengikut dengan provinsi. Pencairannya semakin molor. Berbeda saat masih dikelola Pemkot Semarang, molornya tidak terlalu lama. “Tapi mungkin juga karena masa peralihan, jadi bisa dimaklumi,” ujarnya.

Ia mengatakan, selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membelanjakan dana BOS. Sebab, ia khawatir barang yang sudah dibeli ternyata keliru. Karena itu, perlu pemahaman yang lebih tentang juknis penggunaan dana BOS.

Diakuinya, saat ini dana BOS masuk ke rekening sekolah. Sehingga tidak *by name* ke rekening kepala sekolah maupun siswa. Berbeda dengan dana PIP (Program Indonesia Pintar) maupun BSM (Bantuan Siswa Miskin). Ia menyebutkan, penggunaan dana BOS untuk operasional kegiatan sekolah, seperti belanja modal, barang jasa, dan honorarium.

“Sekolah negeri tidak berani menggunakan BOS untuk honor PNS. Kita sudah digaji pemerintah. Biasanya buat honor guru tamu, narasumber, perawatan, kegiatan kesiswaan, kegiatan praktik anak, dan sarana prasarana (sarpras),” ungkapnya.

Nyaminah menambahkan, untuk membiayai siswa, diakuinya, memang bisa. Hanya saja dalam bentuk pendidikan karakter, seperti latihan PBB (pelatihan baris berbaris). Dana BOS ini bisa digunakan untuk konsumsi dan honor instruktornya. “Jadi bukan *by name*

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 1 dan 7

## Akibat Pencairan Molor, dan Juknis “Abu-Abu” (2)

siswa. Memang dana BOS turun berdasarkan jumlah siswa sebesar Rp 1,4 juta per tahun per siswa. Misalnya, jumlah 1.000 siswa, berarti yang cair Rp 1,4 miliar. Untuk pencairannya dibagi empat triwulan, yakni triwulan 1 sebesar 20 persen, triwulan 2 sebesar 40 persen, serta triwulan 3 dan 4 masing-masing sebesar 20 persen. Jadi cairnya per 3 bulan sekali,” bebernya.

Untuk pencairannya sendiri, dikatakannya, pertama melalui provinsi, kemudian sekolah membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dilampiri laporan penggunaan triwulan sebelumnya. “Kemudian diproses. Kalau ada sekolah yang telat menyetorkan RKAS dan persyaratan lainnya, berimbas pada molornya pencairan BOS sekolah-sekolah lain di Jateng. Untuk pencairan *by* rekening sekolah, namanya rekening BOS,” jelasnya.

Kepala SMA Negeri 2 Semarang Yuwana menampik adanya Silpa dana BOS yang mencapai miliaran rupiah. Dikatakan, sisa dana BOS yang ada hanya sekitar Rp 3 jutaan. Uang itu pun adalah bunga dari bank. “Ini sudah disetorkan ke kas daerah,” ujarnya.

Ketidakcocokan ini, lanjutnya, dikarenakan adanya laporan *online* yang belum tuntas kepada provinsi, karena ketika itu ada gangguan internet. “Belum

selesai laporan sudah keputus,” kilahnya.

Ia mengatakan, dana BOS yang disalurkan ke SMA ini selalu habis setiap tahunnya. Sebesar Rp 1,4 juta kali jumlah siswa, semuanya selalu habis terpakai. Dana ini, lanjutnya, masuk ke sekolah melalui bendahara dan digunakan untuk operasional sekolah. “Bukan diserahkan ke anak,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Gatot Bambang Hastowo, menjelaskan, temuan BPK adalah dana BOS sisa tahun pelajaran 2016/2017 semester I ketika SMA/SMK masih berada dalam kewenangan Pemkot/Pemkab. Setelah kewenangan berpindah ke provinsi, sesuai UU No 23 tahun 2014, sekolah diminta untuk membuat rekening baru untuk memudahkan transfer. “*Nah* itu yang jadi temuan adalah yang berada di rekening lama, karena belum dipindahkan ke rekening baru. Dan sisa itu hanya Rp 5 juta-Rp 10 juta saja,” ujar Gatot kepada koran ini.

Ia menjelaskan, tidak dipindahkannya dana di rekening lama ke yang baru *lah* yang memunculkan adanya ketidakcocokan pada temuan BPK. Selain itu, juga karena perbedaan tahun anggaran dengan tahun ajaran sekolah yang dimulai dari Juli.

Gatot menegaskan, Senin (6/8) hari ini, pihaknya akan mengum-

pulkan seluruh kepala sekolah untuk melakukan rekonsiliasi dengan DPKAD. Uang yang masih ada, akan dihitung kembali, dijadikan satu dengan rekening yang sekarang. Sehingga dapat digunakan untuk belanja BOS. “Uang yang masih ada di rekening lama itu pun *nggak* bisa digunakan oleh sekolah. Uangnya *nggak* kemana-mana. *Lha*, besok (hari ini, Red) akan dikumpulkan semua untuk dilakukan rekonsiliasi. Pencocokan,” tandasnya.

Ia memastikan, setelah berada di provinsi, tidak akan ada persoalan berkaitan dengan selisih penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah. “Karena rekeningnya sudah jadi satu. Tidak akan ada selisih seperti ini,” tegasnya.

Terpisah, Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Pendidikan (LSM) Fitra, Mayadina Rahma, menambahkan, adanya Silpa dana BOS SMA/SMK/SLB itu artinya ada sisa atau kelebihan anggaran yang harus dikembalikan pada rekening negara. Dana BOS sesuai peruntukannya, kata dia, digunakan untuk pendanaan operasional non personalia bagi sekolah dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Kemungkinan lain, lanjut dia, kegiatan sekolah yang sudah mendapat sokongan dana BOS tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, perencanaan ang-

garan gagal dan menyebabkan Silpa BOS di sekolah-sekolah. Dalam hal ini, setiap sekolah mendapat dana BOS berbeda-beda, dan alasan Silpa pun juga berbeda.

Mayadina menjelaskan, ada banyak kemungkinan yang lazim terjadi jika terjadi Silpa pada dana BOS karena terjadi kesalahan dalam menghitung jumlah dana yang ditransfer ke sekolah. Ada persoalan validitas data jumlah penerima BOS yang seringkali tidak akurat. Sebagai contoh, dalam temuan LHP BPK Pemerintah Provinsi Jateng semester 1 tahun 2017, terdapat salah transfer dana BOS triwulan 4 pada 23 SMA di Kabupaten Sragen sebesar Rp 3,063 miliar. Hal ini terjadi karena terdapat kesalahan dalam perhitungan matematis jumlah alokasi dana BOS. Atas kelebihan tersebut telah dikembalikan oleh 23 sekolah terkait. “Seharusnya pihak sekolah melakukan *update* data siswa setiap triwulan serta melakukan pengecekan akurasi jumlah transfer dari Pemerintah Provinsi Jateng untuk mengetahui ada atau tidaknya kelebihan dana transfer,” ujar Mayadina Rahma.

Ia menambahkan, sebaiknya pemerintah melakukan beberapa hal terhadap sekolah yang memiliki Silpa dana BOS, dan memastikan tanggungjawab tim manajemen BOS Provinsi. (jks/mg8/sga/aro)